

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rusia adalah Negara yang terletak di benua Eropa. Negara yang membentang dengan luas di sebelah Timur Eropa dan Utara Asia. Rusia merupakan Negara terbesar di Dunia dengan luas wilayah 17.075.400 km², luas wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok, RRT), Kanada, atau Amerika Serikat. Dimana jumlah penduduknya memuncaki peringkat ketujuh dan mempunyai jumlah terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan. Negara ini merupakan negara bagian terbesar pada era Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet Rusia menjadi ahli waris Uni Soviet terbesar dengan mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya.

Kota- kota besar di Rusia antara lain Moskow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Chelyabinsk, Rostov na Donu, Ufa, Volgograd, Perm, Krasnoyarsk, Saratov, Voronezh, Tolyatti, Krasnodar, Ulyanovsk, Simferopol, dan Izhevsk. Pada era saat ini Rusia masih berusaha keras untuk meraih status sebagai Negara Adidaya kembali. Meskipun Rusia adalah negara

penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan status Uni Soviet dulu.
(Rusia, 2015)

Gambar 1. 1 : Peta Rusia



Sumber : (Hadi, 2014)

Ditahun 1980an, di tahun tersebut Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Kemerosotan ekonomi akibat korupsi dan bobroknya birokrasi serta budaya politik yang semakin monolitik semakin membuat apatisme masyarakat. Saat itu penempatan kekuasaan militer Uni Soviet di kancah Internasional seperti di Afganistan dan di negara – negara Eropa timur membutuhkan biaya yang besar yang tentu saja hal ini menyedot dana domestik yang tidak sedikit. Sementara industri yang sudah terpol pada industri berat yang ditujukan guna menopang hegemoni Uni Soviet tak memberikan jalan keluar yang sangat dibutuhkan masyarakat berupa perbaikan taraf

hidup. Menurunnya tingkat kesejahteraan yang tajam hal ini semakin memperuncing konflik – konflik yang tumbuh dalam negeri.

Kondisi tersebut diatas memaksa para petinggi negara dan pemimpin partai untuk mengadakan koreksi atas kebijakan partai serta kebijakan politik negara Uni Soviet secara umum. Tak hanya itu peninjauan ulang terhadap strategi sistem sosialisme pun lalu dianggap sebagai sebuah langkah yang mampu menjawab berbagai krisis yang menimpa.

Ditahun 1985 Majelis Tinggi Uni Soviet memilih Michael Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet. Kebijakan *Glasnost* dan *Perestroika* di telah dijalankan masa pemerintahan Gorbachev. *Glasnost* ialah memberikan kebebasan berbicara yang lebih besar, pers menjadi jauh lebih merdeka dan ribuan tahanan politik dibebaskan dan banyak pembangkang dibebaskan. Sementara tujuan utama Gorbachev dalam mengadakan *Glasnost* yakni untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan – kebijakan restrukturisasi ekonominya, Gorbachev berharap melalui keterbukaan, debat, dan partisipasi rakyat Soviet akan mendukung inisiatif – inisiatif pembaharuannya. (Saputra, 2014)

Sedangkan kebijakan *Perestroika* (ekonomi) adalah sebuah resuktrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi (*zastoy*) dan kelumpuhan total, dengan menciptakan mekanisme percepatan (*uskorenie*) yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat, pada perkembangan demokrasi dan perluasan

keterbukaan. Tujuan akhir dari langkah reformis ini adalah untuk memperbaiki masyarakat Soviet secara politik, ekonomi dan moral. (Fahrudodji, 2005)

Kebijakan *Glasnost* dan *Perestroika* yang dijalankan pemerintah Gorbachev ternyata membawa pengaruh bagi semakin menguatnya gerakan separatisme akibat semangat keterbukaan dan demokratisasi yang menjadi inti dari kebijakan tersebut. Berbagai konflik antar etnis yang sudah lama menghilang mulai muncul lagi menjadi konflik terbuka. Ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menangani masalah ekonomi juga semakin mendorong ketidakpuasan di republik – republik konstituen Uni Soviet. Ketidakpuasan ini pada gilirannya mendorong munculnya kekuatan oposisi setempat yang mulai menyuarakan ide – ide separatisme.

Hal ini semakin membawa Uni Soviet ke dalam situasi yang sangat kompleks, yang jika dibiarkan akan menimbulkan perpecahan negara. Situasi genting ini di pahami oleh pemimpin Uni Soviet yaitu Michael Gorbachev. Untuk mengantisipasi kehancuran yang mungkin akan terjadi Gorbachev mengumpulkan para pemimpin republik Uni Soviet dalam pertemuan di Novo – Ogaryov. Dalam pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan perlunya pembaharuan ‘perjanjian’ yang mengikat persatuan bangsa – bangsa yang tergabung dari perserikatannya dalam Uni Soviet. Pertemuan yang di hadiri oleh 9 dipimpin republik – republik (9+1) itu rencananya di tandatangani tanggal 20 Agustus 1991. Namun penandatanganan pilar penyangga eksistensi Uni Soviet ini gagal oleh aksi penyanderaan dan kudeta yang dilakukan oleh orang – orang terdekat Gorbachev. Pada tanggal 18 Agustus 1991 diisolasi di rumah

peristirahatannya (*Dacha*) sehingga akses menuju pusat Moskow terputus. Pada tanggal 19 Agustus 1991 diumumkan tentang pemberhentian Michael Gorbachev dari jabatan dengan alasan kesehatan. (Fahrudodji, 2005)

Kegagalan reformasi ekonomi – politik Michael Gorbachev menandai pula runtuhnya Uni Soviet dan kemudian berganti dengan Federasi Rusia atau kedaulatan Rusia. Kegagalan *perestroika* dan *glasnost* mewariskan Rusia dengan banyak permasalahan dari berbagai bidang. Adanya permasalahan ekonomi yang muncul akibat menegangnya hubungan antar kedaulatan. Munculnya konflik antara etnis dan serta melemahnya pertahanan dan keamanan. Pada akhirnya tanggal 24 Agustus 1991 Michael Gorbachev secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet.

Saat Uni Soviet runtuh menjadi 13 Negara bagian, Rusia menjadi Negara yang paling kuat diantara Negara - negara bagian lainnya karena pada saat itu Rusialah yang mewarisi separuh dari penduduk Uni soviet, luas wilayah, lengkap beserta persenjataan yang dimiliki Uni Soviet pada jaman dulu. (Saragih, 2008) Kehancuran Uni Soviet saat itu, mengembalikan Rusia pada pertanyaan abadi menyangkut eksistensi bangsa ini. Pertanyaan ini pada gilirannya berkaitan dengan pencarian jati diri Rusia yang berakar pada masa lalu hingga masa kini dengan masa depan. Tanggal 12 juni 1991, merupakan tanggal dimana untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan langsung atau pemilu di Rusia, pemilu tersebut diselenggarakan oleh Gorbachev sebelum beliau mengundurkan diri, guna

mendapatkan calon presiden yang syah dan saat itu dimenangkan oleh Presiden Boris Yeltsin. Tentunya hal ini menjadi sejarah baru bagi kepemimpinan Rusia dalam menjalankan sistem demokratis dalam memilih calon pemimpin Negara bagi mereka. Era Boris Yeltsin dikenal sebagai era revolusioner sekaligus menandai masa berakhirnya era komunisme di Rusia. Masa ini disebut dengan masa transisi menuju demokrasi Rusia. Saat ini di kalangan masyarakat Rusia ada berbagai pandangan terhadap apa yang berlangsung hingga saat ini. Masa transisi yang tengah dihadapi Rusia, oleh sebagian masyarakat Rusia dianggap sebagai proses menuju kelahiran kembali Rusia. Sebagaimana kejayaan masa imperium Rusia. Sebagaimana lagi pesimis dengan masa depan Rusia dan menilai Rusia sedang dalam perjalanan menuju kehancuran.

Yeltsin memiliki persamaan politik dengan era Gorbachev yakni sama-sama berusaha menerapkan demokrasi. Memang pada awalnya pemerintahan Gorbachev bersikap otoriter namun demi menerapkan kebijakan *Glasnost* (keterbukaan politik), *Perestroika* (reskontruksi ekonomi), hal ini membutuhkan demokrasi dalam penerapannya sehingga Gorbachev berusaha menerapkan demokrasi. Hal ini diperkuat dengan terselenggaranya pemilu di Rusia untuk pertama kali yang dimenangkan oleh Boris Yeltsin. (Boris Yeltsin, 2015) Kemudian Yeltsin melanjutkan meneruskan usaha Gorbachev yakni menerapkan demokrasi di Rusia.

Dengan adanya reformasi di Rusia dari era Gorbachev menuju Yeltsin, sehingga pada saat tersebut terjadilah masa transisi di Rusia dari era komunis menjadi

era liberal, Hal ini dianggap sebagian masyarakat Rusia guna membawa angin segar bagi kemajuan bangsa Rusia dibawah kepemimpinan presiden Boris Yeltsin.

Pemerintahan Yeltsin pasca runtuhnya Uni Soviet menjadi Rusia, Rusia harus dihadapkan dengan masalah yang kompleks akibat kegagalan *perestroika* yakni Rusia harus mampu menyesuaikan sistem Politik, system ekonomi, dan mencari orientasi peran baru dalam arena Internasional. Dalam kontek kebijakan luar negeri, Rusia dituntut untuk menciptakan politik luar negeri yang mendukung perubahan politik dan ekonomi didalam negeri serta mampu beradaptasi ditengah perubahan lingkungan Internasional.

Saat itu Yeltsin mencanangkan adanya pemulihan ekonomi yang moderat dengan menggunakan *Shock Therapy* atau *Shock Doktrin* yang dijalankan di Rusia. System ekonomi tersebut membuat persaingan usaha lebih terbuka ditengah penurunan kondisi ekonomi yang cukup drastis dimasa transisi pasca komunisme. System ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan resep neoliberal yakni *Washington Consensus* dan *Structural Adjustment Programmes (SAPs)* dimana paket stabilisasi ekonomi ini dikeluarkan oleh *IMF* dan *World Bank* sebagai bentuk bantuan terhadap Negara – Negara anggota yang sedang mengalami kondisi krisis ekonomi dan pembangunan

Dengan dijalankanya upaya pemulihan ekonomi pada masa pemerintahan Boris Yeltsin di lain sisi data menunjukan pada saat pemerintahan Yeltsin terjadi kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi rusia yang cukup besar terjadi pada

saat diterapkannya *Shock Therapy* yang dicanangkan oleh Boris Yeltsin. Gambaran dari proses krisis sebagai dampak dari ekonomi *shock therapy* Yeltsin mengantarkan negeri itu ke ambang krisis yang luar biasa. Ketidaksamaan pendapatan (*income inequality*) Rusia tahun 1990-an melonjak secara tajam yakni dari 24% pada tahun 1987 sampai 1988 berubah menjadi 48% pada tahun 1994 hingga 1995 dan diperkirakan akan terus naik. Negara pembayaran Rusia mengalami penurunan secara berarti yakni dari 39,5% dari GDB ditahun 1992 menjadi sekitar 27% pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 1997 GDP naik namun hanya sedikit yakni dibawah 28% ditahun 1997.

Sejak lepas dari Uni Soviet, GDP Rusia setiap tahunnya merosot terus hingga 40%. Tahun-tahun 1992 dan 1993, mengalami penurunan menjadi 20% dan 12% kemudian pada tahun 1994 sempat mengalami kenaikan namun hanya sedikit yakni hanya menjadi 15% pada tahun 1998. Selama 4 tahun penurunannya ditaksir mencapai sekitar 60%. Sedangkan inflasinya yang diakibatkan oleh dilepasnya kontrol pemerintah terhadap harga kebutuhan pokok melonjak tajam pada capaian 84,5% dalam (hiperinflasi) ditahun 1998, dan akan cenderung naik. Sebelumnya, kenaikan inflasi hanya mencapai 46%. Kenaikan inflasi diperkirakan rata-rata antara 2,0-2,5% perbulan. Sedangkan angka penduduk miskin masih cukup tinggi yakni 2% dari jumlah penduduk dijamin Uni Soviet pada tahun 1987-1988 menjadi 50% antara tahun 1993 hingga 1995. Berarti, sekitar 74,2 juta penduduk Rusia masi miskin. Berdasarkan data resmi pemerintah tingkat pengangguran semakin parah yakni

sekitar 4,6% pada tahun 1994 kemudian meningkat menjadi 8,3% ditahun 1995 dan 9,3% ditahun 1996. Namun kalau taksiran ILO yang dipakai maka angka 4,6% tahun 1994 tersebut meningkat menjadi 12,9% tahun 1997. (Sunaryono, Rusia Pasca Komunisme : Jalan Panjang Menuju Perubahan, 2012)

Berdasarkan fenomena dari latar belakang diatas, penulis ingin mencoba memaparkan mengenai hambatan kebijakan liberalisasi ekonomi Rusia dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin. Karena hanya ada 3 cara bagi rusia untuk bangkit kembali yang pertama yakni dengan mengembalikan Rusia pada system pra-*Bolshevik* yakni dengan mengadopsi elemen-elemen imperium Rusia, kedua kembali ke sistem sosialisme Soviet, ketiga dengan jalan mengadopsi nilai-nilai demokrasi barat. (Fahrurodji, 2005) Kemudian Rusia dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin memilih jalan ketiga yakni dengan mengadopsi nilai-nilai demokrasi Barat. Langkah reofrmasi dan liberalisasi pasar yang dikedepankan oleh Presiden Boris Yeltsin memperlihatkan penguatan versi ketiga arah perkembangan bangsa ini. Namun pada kenyataannya agenda pemulihan ekonomi yang dicanangkan Yeltsin yang didalamnya memuat orientasi Boris Yeltsin dalam meliberalisasikan ekonomi Rusia mengalami hambatan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan kedalam suatu pertanyaan yakni : Apa hambatan kebijakan liberalisasi ekonomi Presiden Boris Yeltsin di Rusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti mengenai orientasi kebijakan ekonomi serta hambatan-hambatan yang dihadapi Presiden Boris Yeltsin dalam meliberalisasi ekonomi pada tahun 1991 – 1999. Disamping itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini yakni mengembangkan kemampuan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori dalam ilmu hubungan internasional dalam memahami kasus – kasus dalam ilmu hubungan internasional.

D. Landasan Teori

Untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka diperlukan kerangka dasar teori yang dipergunakan untuk menyusun hipotesa selanjutnya. Teori dapat membantu kita dalam menjelaskan dan meramalkan fenomena politik, dan dengan demikian juga membantu kita dalam pembuatan keputusan praktis. (Mas'ood, 1994)

“Teori adalah suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penulisan. Dalam hal ilmu pengetahuan empiris (termasuk ilmu politik), teori mengacu pada kaitan logis pada seperangkat proposisi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan atau keduanya. (J. C PLANO, 1985)

Untuk menyelesaikan masalah mengapa proses liberalisasi ekonomi di Rusia era Boris Yeltsin mengalami hambatan. Maka penulis membutuhkan teori mengenai liberalisasi. Liberalisasi berasal dari kata liberalisme yakni merupakan suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan dibidang budaya, hukum, ekonomi serta tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu, agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya itu sebebasmungkin. Inti pokok liberalisme adalah terjaminnya kemerdekaan individu, karena masyarakat merupakan kumpulan dari individu – individu. Menurut Dr Nur Azizah Pengertian liberalisasi ekonomi merupakan suatu proses dalam memudahkan aturan ekspor dan impor, mempermudah aturan investasi, dan mempermudah aturan yang terkait dengan jasa.

Liberalisme Modern (John Maynard Keynes)

Perkembangan liberalisme di bidang perkenomian pada abad ke 18 di pelopori oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* tahun 1776. Smith berpendapat bahwa kesejahteraan umum dapat dicapai apabila diberikan kebebasan pada setiap individu untuk berusaha tanpa campur tangan dari pihak pemerintah. Pernyataan itu mendorong setiap individu untuk semakin memperhatikan kepentingan pribadi. Perhatian yang lebih besar kepada kepentingan pribadi itu akan meningkatkan produktifitas dengan sendirinya. Dorongan serta motif berdasarkan keuntungan diri sendiri menjadi latar belakang segala kegiatan manusia. Itulah dasar kelahiran ajaran liberal yang berawal dari kepentingan perkenomian.

Teori Adam Smith tersebut berjalan lancar pada ekonomi negara – negara sampai awal abad ke 20. Teori tersebut menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, yang diiringi dengan tingkat harga – harga yang bergerak relatif stabil. Ekonomi model ini kemudian dikenal dengan ekonomi liberalisme atau ekonomi kapitalisme. Namun resep dari Smith harus berakhir dengan malapetaka besar. Tahun 1999, ekonomi dunia mengalami depresi besar (*great deperesion*) pertumbuhan ekonomi seakan berhenti. Dampaknya pengangguran merajalela dimana – mana, kemiskinan merebak diseluruh dunia. Para pakar ekonomi, ketika itu saling menyalahkan karena peristiwa buruk itu terjadi. (Simon, 2015)

Dari kegagalan liberalisme inilah muncul ekonom baru bernama John Maynard Keynes (1883-1946) yang memberikan resep untuk mengatasi krisis global tersebut. Faham liberalisme modern (baru) merupakan antitesa yang mengoreksi prinsip-prinsip fundamental liberalisme klasik (lama) sebagaimana diuraikan Spencer yang sebagian besar pijakan gagasan-gagasannya didasarkan pada pemikiran Adam Smith (1723-1790). Sebagaimana telah disinggung didepan dalam tulisan ini, dalam membahas kembali isu liberalisme lama dan baru, Ebenstein mengambil John Maynard Keynes sebagai representasi dari pemikiran liberalisme modern. Pertimbangannya sangat jelas dan masuk akal : Keynes, yang pernah hidup dan bersentuhan dengan pemikiran *Spencer*, adalah tokoh liberalisme utama yang secara

keras dan gamblang mengoreksi prinsip-prinsip liberalisme klasik model Smith dan Spencer.

Oleh karena pikiran-pikirannya sebagaimana ia kemukakan terutama dalam dua bukunya yang terakhir, *The End Of Laissez Fair* (1926), dan *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), Keynes bahkan dianggap sebagai “penyelamat” liberalisme dari kebangkrutannya lantaran keliru dalam memahami dan mempraktikkan faham *laissez faire*. Dalam sebuah pidato, berjudul “*The End of Laissez Faire*” (judul pidatonya ini kelak menjadi judul salah satu bukunya) yang dikemukakan tahun 1926, Keynes menegaskan : “*Tidak benar bahwa individu mempunyai kebebasan alamiah dalam aktivitas ekonominya. Juga tidak benar bahwa kepentingan diri umumnya adalah baik. Pengalaman tidak menunjukkan bahwa individu, ketika mereka berada dalam unit sosial, selalu lebih berpandangan jernih dibandingkan ketika mereka bertindak sendirian*”.

Pemikiran-pemikiran Keynes, terutama yang dijabarkannya dalam buku *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), yang terbit sepuluh tahun kemudian sejak pidato terkenalnya itu memang bertolak dari keprihatinan dan kegalauannya menyaksikan pelbagai distorsi dari penerapan faham *laissez faire* murni yang mengakibatkan depresi besar tahun 1930-an di Eropa dan Amerika. Keynes melihat ada yang keliru dalam faham *laissez faire*. Berikut ini adalah pokok-pokok pikirannya yang mengoreksi kekeliruan-kekeliruan liberalisme klasik itu.

Pertama sekali Keynes menegaskan bahwa untuk menolong sistem perekonomian negara-negara penganut liberalisme klasik dari kebangkrutannya karena krisis ekonomi pada tahun 1930an itu, bangsa-bangsa harus bersedia meninggalkan ideologi *laissez faire* yang murni. Artinya, prinsip membebaskan individu-individu dalam mengelola dan menjalankan kehidupannya tanpa melibatkan pemerintah harus dihentikan. Pemerintah harus melakukan campur tangan lebih banyak dalam mengendalikan perekonomian nasional.

Keynes mengatakan bahwa kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih tetap bisa dipegang oleh pihak swasta, tetapi pemerintah wajib mengambil langkah-langkah kebijakan yang secara aktif akan dan harus mampu mempengaruhi gerak perekonomian negaranya. Sebagai contoh, pada saat terjadi depresi itu, pemerintah harus mengambil prakarsa melakukan berbagai program atau kegiatan yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja (yang tidak tertampung di sektor swasta), meskipun untuk itu negara harus menggelontorkan anggaran (subsidi) yang sangat besar. Jika tidak, maka pengangguran akan merebak dimana-mana, dan ini tentu berdampak luas dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, Keynes dan para pendukung pemikirannya sama sekali tidak percaya perihal kekuatan hakiki dari sistem *laissez faire* yang akan mengoreksi dirinya sendiri sehingga tercapai kondisi efisien (*full employment*) secara otomatis. Kondisi *full-employment* sebagaimana pernah dijelaskan *Spencer* akan tercapai dengan sendirinya melalui mekanisme pasar itu, dalam pandangan Keynes hanya

dapat dicapai dengan tindakan-tindakan terencana dan sistematis. Dan ini tentu membutuhkan “pihak ketiga” dalam ruang aktifitas perekonomian dan bisnis. Pihak ketiga inilah pemerintah.

Sebagaimana sudah diuraikan dalam pemikiran *Spencer*, para pendukung liberalisme klasik berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Alasannya, mereka menganggap dan meyakini bahwa perekonomian akan dengan sendirinya mampu mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga sumberdaya ekonomi yang ada akan mampu digunakan secara efisien, dan akan selalu terjadi keadaan dimana kondisi perekonomian pada *full employment*. Pandangan dan keyakinan ini cukup lama berakar dan dipegang sebagai landasan perekonomian sebelum munculnya Keynes yang membawa perspektif baru dalam tradisi liberalism. Perspektif baru Keynes ini, sekali lagi bertumpu pada keyakinan bahwa intervensi pemerintah itu diperlukan dalam perekonomian dalam upaya membuat suatu kehidupan bersama yang lebih baik.

Apa yang melatarbelakangi lahirnya perspektif baru liberalisme dari Keynes ? Seperti telah banyak diungkap dalam sejarah perkembangan liberalisme lama dan baru, kelahiran perspektif Keynes tidak terlepas dari fenomena yang mengagetkan kaum liberalisme klasik. Yakni terjadinya depresi besar (*great depression*) yang mengakibatkan terjadinya pengangguran besar-besaran, yang dialami oleh negara-negara barat penganut prinsip liberalisme klasik. Pengangguran besar-besaran ini merupakan fenomena yang terbukti tidak dapat dijawab oleh kaum klasik pada waktu

itu. Kaum klasik mengatakan bahwa di dalam perekonomian yang *full employment* (padahal mereka mengatakan perekonomian selalu *full employment*) tidak ada pengangguran (*unemployment*). Tetapi kenyataan pada saat itu terjadi pengangguran besar-besaran. Munculnya pemikiran Keynes ini juga sekaligus membuka cakrawala baru dan menjadi tonggak sejarah penting bagi keberadaan makroekonomi.

Pijakan dasar konsep ekonomi-politik liberalisme baru sebagaimana digagas Keynes antara lain bermuara pada gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Keynes melihat dan memposisikan pasar sebagai salah satu dari berbagai macam model hubungan sosial bentukan manusia. Pasar bukanlah gejala alami. Oleh karena itu maka pasar sesungguhnya dapat diciptakan dan dibatalkan menurut desain kehendak manusia sendiri. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana juga tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi, sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan politik yang bertugas menciptakan serangkaian prakondisi bagi operasinya agar adil namun tetap kompetitif.

Selanjutnya Keynes menegaskan, bahwa harus ada penolakan atas kinerja kapitalisme yang hanya didasarkan pada logika modal atau capital semata. Transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk dari relasi sosial manusia, oleh karenanya hubungan-hubungan sosial manusia bukanlah untuk mengabdikan kepada kapitalisme, melainkan kapitalisme yang harus mengabdikan untuk membantu kebutuhan relasi sosial manusia agar berlangsung dengan adil dan kompetitif.

Dan bagi Keynes, kapitalisme hanyalah merupakan sistem ciptaan manusia atau *human construct*, oleh sebab itu pastilah dapat diubah serta dimodifikasi dan desain ulang oleh manusia. Dalam rangka proses mengubah dan memodifikasi kapitalisme itu, maka diperlukan suatu proses transformasi kapitalisme, dimana dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan perspektif dan bentuk-bentuk baru kapitalisme yang lebih sesuai dengan kebutuhan relasi sosial manusia.

Gejala konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir pengusaha bukanlah suatu gejala alami atau nasib alami dari sistem ekonomi kapitalisme. Hal tersebut semata merupakan suatu strategi ekonomi-politik yang gagal, dan produk gagal itu dapat dicegah dengan rangkaian berbagai politik kebijakan sosial dalam suatu kebijakan sistem kesejahteraan atau *Welfare System*.

Selanjutnya dalam gagasan liberal baru kebijakan sosial merupakan prasyarat mutlak bagi bekerjanya ekonomi yang adil dan kompetitif. Serangkaian kebijakan sosial, mutlak diperlukan sebagai pencegah terjadinya kesenjangan kekuasaan ekonomi yang tajam, serta untuk menciptakan dan memperluas semangat usaha masyarakat disamping untuk menciptakan iklim inovasi disegala bidang

Pada kesempatan lain, Keynes menyatakan bahwa permasalahan politik yang dihadapi oleh umat manusia sesungguhnya terdiri dari kombinasi 3 (tiga) hal yaitu : efisiensi ekonomi, keadilan sosial dan kebebasan individu. Dalam efisiensi ekonomi dibutuhkan adanya sikap kritis, langkah-langkah penghematan dan pengetahuan teknis yang memadai. Menyangkut masalah keadilan sosial, dibutuhkan adanya sikap

terbuka yang mengedepankan kepentingan publik atau rakyat banyak. Dan berkenan kebebasan individu, masyarakat manapun sesungguhnya memerlukan adanya sikap toleransi, kebesaran hati dan apresiasi yang tinggi atas keragaman; dan yang paling penting adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi keinginan dan cita-cita yang tinggi dari setiap warga negara. (Sutisna, 2014)

Dalam hal ini liberlisasi ekonomi keynes memiliki ciri sebagai berikut :

- a. memudahkan aturan ekspor dan impor
- b. mempermudah aturan investasi
- c. mempermudah aturan yang terkait dengan jasa
- d. adanya campurtangan pemerintah dalam perekonomian negara pada saat-saat tertentu.

Liberalisasi menyangkut aturan-aturan yang terkait dengan

- a. investasi
- b. perdagangan
- c. jasa

Pada saat itu Yeltsin terpilih menjadi Presiden Rusia, program – program yang dicanangkan oleh Yeltsin salah satunya pengenalan reformasi ekonomi yang berorientasi pasar secara radikal. Yeltsin mencoba mengadaptasi pemikiran Keynes yang berpendapat bahwa negara pada saat – saat tertentu diperlukan untuk campur tangan dalam masalah perekonomian. Keynes merekomendasikan agar perekonomian

tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Agar terjadi keseimbangan antara pasar dan peran pemerintah. Pada saat itu Yeltsin memberlakukan adanya kontrol pemerintah pusat terhadap kegiatan ekonomi. Pada saat itu Rusia dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin menerapkan agenda pemulihan ekonomi menggunakan liberalisasi secara moderat yang diimplementasikan oleh Yeltsin dalam *Shock Therapy* yang terdiri dari 3 pilar utama yakni stabilisasi, liberalisasi dan privatisasi. Program tersebut di desain Yegor Gaidar sebagai Wakil Perdana Menteri . Yegor merupakan ahli ekonom liberal yang dikenal sebagai advokat dari Shock Therapy. (Fernando, 2006)

Program *Shock Therapy* awalnya dicanangkan dalam waktu 500 hari guna mengubah ekonomi Uni Soviet yang semula terpusat menuju ekonomi market. Yeltsin dalam hal liberalisasi ekonomi. Variabel yang di liberalisasikan dalam era Boris Yeltsin menurut Bambang Sunaryono dalam bukunya Rusia Pasca Komunisme yakni menyangkut :

a. Pasar Bebas

Pasar di Rusia di buka selebar – lebarnya terhadap arus produksi luar negeri. Pembukaan ekonomi pada sektor perdagangan luar negeri ini dimaksudkan untuk memungkinkan pasar internasional mempengaruhi struktur harga pasar dalam negeri. Dimana pemerintah menghilangkan semua hambatan dalam perdagangan seperti pembatasan perdagangan, kuota ekspor dan impor serta tarif. Namun pada praktiknya liberalisasi

pasar di Rusia era Yeltsin tidak berjalan dengan baik karena mengakibatkan harga melambung tinggi sementara produksi yang diharapkan naiknya tidak terbukti yang berakibat pasar di Rusia mengalami kelesuan dan keterpurukan.

b. Harga

Di era pemerintahan Yeltsin dilakukan liberalisasi harga. Pembebasan harga ini ditunjukkan untuk mengurangi pengawasan dan subsidi harga pemerintah, pengurangan ini penting sebagai langkah awal bagi terciptanya pasar domestik dan luar negeri. Dalam praktiknya liberalisasi harga di Rusia menimbulkan lonjakan laju inflasi karena harga-harga melonjak dengan drastis.

c. Mata Uang

Mata uang Rusia secara realistis juga harus dihargai agar memudahkan pertukarannya dengan mata uang asing. Tahun 1992, atas arahan Yeltsin mengatakan bahwa mata uang Rubel akan menjadi mata uang yang dapat dipertukarkan dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar uang dunia tanggal 2 Januari 1992 Rusia telah legalkan untuk membeli mata uang asing dengan harga pasar. (Sunaryono, Rusia Pasca Komunisme : Jalan Panjang Menuju Perubahan, 2012)

Program pelaksanaan *shock therapy* ini yang semula dicanangkan 500 hari kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Yavlinsky dan Yeltsin mengenai lamanya pelaksanaan program tersebut. Yavlinsky menghendaki pelaksanaan secara pelan dan bertahap, yakni paling tidak program tersebut dapat dimulai tahun 1997-an karena dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengubah ekonomi komando ke ekonomi pasar. Namun Yeltsin berpendapat sebaliknya, dimana Yeltsin menginginkan transformasi secara radikal dan cepat agar bebas dari tanggung jawab dan tekanan kemerosotan ekonomi peninggalan Uni Soviet. Kemudian Yavlinsky digantikan oleh Yegor Gaidar dan dibantu Gennady Burbulis keduanya berkolaborasi membuat program pemulihan ekonomi 6 bulan di Rusia yang disebut '*Shock Therapy*'. Untuk itu Gaidar percaya bahwa semua struktur Uni Soviet yang lama harus dibubarkan dulu. *Shock Therapy* atau *Big Bang* sama dengan Yeltsin dimana sama-sama menolak perubahan ekonomi bertahap karena hal itu hanya akan menciptakan ekonomi cangkokan yang tidak seimbang dimana sisa-sisa pendukung ekonomi terpusat akan merusaknya karena kecewa terhadap program ekonomi pasar dan hal itu memungkinkan para elit komunis untuk menyimpan kekuatan untuk melawan dan pasar mempertanyakan mengenai liberalisasi yang berjalan setengah-setengah. *Shock Therapy* ini dipilih karena ekonomi yang dikontrol oleh negara membutuhkan 'goyangan' keras untuk menghilangkan semua jenis pengendalian negara jadi, tidak ada konsensus diantara koalisi kekuatan yang sebelumnya berhasil menghancurkan sosialisme Soviet tentang sistem politik serta ekonomi yang akan

diambil. Sekali sosialisme Uni Soviet bisa dikalahkan, perbedaan-perbedaan diantara koalisi ini semakin jelas. Secara demikian, Rusia memulai babak baru Post Komunisme tanpa penyangga kuat dalam bentuk konsensus para elitnya. (Sunaryono, Rusia Pasca Komunisme : Jalan Panjang Menuju Perubahan, 2012)

Namun dalam praktiknya liberalisasi ekonomi yang dicanangkan oleh Boris Yeltsin mendapatkan hambatan dari kaum elit dimana politbiro Rusia pada era Yeltsin masih didominasi oleh orang-orang lama yakni para elit komunis sehingga tercipta konflik antara elit yang menentang kebijakan liberalisasi ekonomi Boris Yeltsin. Meskipun dalam rencana liberalisasi ekonomi Yeltsin mencanangkannya adanya pembubaran politbiro lama tetapi pada kenyataannya orang-orang elit komunis lama yang tergabung dalam partai komunis Federasi Rusia masih merupakan partai yang secara politik masih kuat dan potensial sehingga walaupun terjadi pembubaran pada November 1991 partai tersebut masih eksis dalam politbiro di Rusia sehingga menimbulkan hambatan bagi terselenggaranya liberalisasi ekonomi yang dicanangkan Yeltsin.

Selain dari pada hambatan diatas ada hambatan lain yakni adanya hambatan dari faktor eksternal berupa kesangsian pasar terhadap liberalisasi yang di jalankan oleh Boris Yeltsin yang berjalan setengah-setengah seperti dalam penerapan *shock doktrin* atau *shock therapy* yang merupakan creminan dari liberalisasi secara moderat yang diterapkan oleh Yeltsin. Dimana terdapat adanya ketidakjelasan aturan yang terkait investasi yakni mengenai perundang-undangan di rusia yang menyangkut

aturan bisnis, maraknya korupsi, serta penguasaan aset negara sebagian besar oleh para kaum *oligarchy* serta munculnya konflik antar elit di rusia.

E. Hipotesa

Hambatan-hambatan kebijakan Liberalisasi ekonomi Boris Yeltsin adalah :

1. Internal : Lembaga Polit Biro yang masih didominasi oleh Komunis
2. Eksternal : Ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan Liberalisasi Yeltsin

F. Metodologi Penelitian

1. Unit Analisa

Unit analisa dari penelitian ini berupa State Representation Boris Yeltsin sebagai Presiden Rusia.

2. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode riset dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang diperoleh dari berbagai literature yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mencari sumber dan data dari perpustakaan dan observasi tidak langsung, seperti dari

berbagai buku-buku dan tulisan ilmiah, surat kabar, media massa, e book, artikel serta berbagai data dan informasi baik cetak maupun elektronik yang menunjang jalannya penulisan. Berbagai fasilitas yang digunakan penulis dalam

pengumpulan data antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Perpustakaan FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada
4. Internet

4. Cara Analisis

Tahap analisa data ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-kualitatif, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. (Bungin, 2007) Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga

peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat penelitian.

Penggunaan metode kualitatif didasari dengan alasan karena data utama yang diperoleh disini berupa data sekunder, sehingga tidak bisa diukur secara langsung. Metode kualitatif ini akan digunakan untuk melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap fenomena-fenomena yang dikaji.

5. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data serta analisa maka penulis memerlukan batasan penelitian yakni tahun 1991 sebagai awal mula masa transisi Pemerintahan Michael Gorbachev menuju Pemerintahan Boris Yeltsin. Dan pada tahun 1999 sebagai batas akhir penelitian. Penelitian akan fokus terhadap orientasi kebijakan Boris Yeltsin dalam meliberalisasi ekonomi dan hambatannya di Rusia. Penulis kemungkinan akan sedikit menyinggung masalah diluar focus pembahasan dari masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembahasan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan oleh penulis dalam penelitian ini :

BAB I. Berisi mengenai pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Sistem Transisi Ekonomi Politik Rusia, Bab ini menjelaskan tentang penerapan sistem Reformasi ekonomi politik di masa transisi Rusia dari Michael Gorbachev menuju Boris Yeltsin.

BAB III. Bab ini akan membahas kebijakan liberalisasi ekonomi Rusia era Boris Yeltsin.

BAB IV. Hambatan-hambatan dalam orientasi kebijakan liberalisasi ekonomi Boris Yeltsin, bab ini akan membahas mengenai apa saja yang menjadi penghambat diterapkannya liberalisasi ekonomi di Rusia.

BAB V. Kesimpulan, Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV yang dikaji dalam penelitian ini. Kesimpulan ini berisi pada gambaran singkat mengenai hasil penelitian.